

HUKUM JUAL BELI ASI

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD SAHAL MAHFUDZ

NIM 17103060048

PEMBIMBING:

VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19710802 200604 2 001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Air Susu Ibu (ASI) merupakan kebutuhan dan asupan yang harus didapatkan bayi dari umur 0-6 bulan atau biasa dinamakan dengan ASI Eksklusif. Dalam hal ini masih banyak bayi yang belum mendapatkan ASI dari ibunya dikarenakan beberapa faktor, diantaranya faktor kesehatan ibu, meninggalnya seorang ibu, atau dikarenakan kesibukan orang tua akibat pekerjaannya. Untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi bayinya, banyak ibu yang menggunakan cara mendapatkannya dengan membeli dari orang perorangan atau dari media sosial. Dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang jual beli ASI tersebut, terutama Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli ASI tidak diperbolehkan, karena ASI merupakan bagian anggota tubuh manusia. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jual beli ASI diperbolehkan, karena ASI merupakan benda yang suci dan dapat dimanfaatkan.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yang menggunakan literatur berupa kitab, buku, jurnal, kamus, dan karya pustaka yang berkaitan dengan obyek kajian. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yakni menguraikan data-data yang berkaitan dengan hukum jual beli ASI menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kemudian mengungkap aspek apa saja yang digunakan oleh kedua Imam terkait dengan kasus ini, beserta dengan *Ijtihadnya*. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh, kemudian menganalisis pendapat dari kedua Imam untuk menemukan hukumnya.

Hasil penelitian ini adalah, bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menggunakan dalil yang berbeda. Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan jual beli ASI karena menyamakan ASI dengan daging manusia, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jual beli ASI diperbolehkan karena ASI disamakan dengan susu kambing dan sapi. Dalam menetapkan hukum jual beli ASI keduanya mempunyai kesamaan, yaitu menggunakan metode *qiyas*. Dalam kasus ini, Imam Abu Hanifah lebih melihat jual beli ASI pada kesucian benda dan kemudharatan yang terjadi ketika jual beli ini dilakukan. Sedangkan Imam Malik melihatnya dari sisi kemaslahatan barang yang diperjualbelikannya.

Kata kunci: jual beli ASI, Imam Abu Hanifah, Imam Malik

PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Sahal Mahfudz

NIM : 17103060048

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1442

22 November 2020

Saya menyatakan,



Muhammad Sahal Mahfudz

NIM: 17103060048



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Sahal Mahfudz

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sahal Mahfudz

NIM : 17103060048

Judul : "Hukum Jual Beli ASI Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Akhir 1442 H
10 Desember 2020 M
Pembimbing,

VITA FITRIA, S.AG., M.AG.
NIP. 1971088 2200604 2 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-277/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM JUAL BELI ASI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SAHAL MAHFUDZ
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060048
Telah diujikan pada : Jumat, 16 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



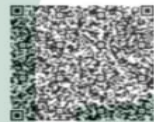
Ketua Sidang
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6081903511ab6



Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 608181eb3d21e



Penguji II
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6082996880968



Yogyakarta, 16 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 608388b1f251e

MOTTO

“SABAR, NRIMO, IKHTIYAR, DAN DOA”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HAL PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak, ibu, adik-adikku, keluarga besar, dan seseorang yang selalu memberikan support, motivasi, dan doa yang tak pernah lupa untuk dipanjatkan.

Segenap guru dan teman-teman Almameter yang sangat saya banggakan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| <i>Huruf Arab</i> | <i>Nama</i> | <i>Huruf Latin</i> | <i>Keterangan</i> |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | ša' | š | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | J | Je |
| ح | Hâ' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | k dan h |
| د | Dāl | D | De |
| ذ | Ẓāl | Ẓ | z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye |
| ص | Sâd | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dâd | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Tâ' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ظ | Zâ' | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Aīn | ' | Koma terbalik ke atas |
| غ | Gāīn | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | 'el |
| م | Mīm | M | 'em |
| ن | Nūn | N | 'en |
| و | Wāwu | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>'Iddah</i> |

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-Auliyā'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah, kasrah dan Ḍammah* ditulis *t*

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-Fiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| َ | <i>Fathah</i> | Ditulis | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| ـ | <i>Ḍammah</i> | Ditulis | U |
|---|---------------|---------|---|

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|--------------------------|---------|-------------------|
| 1 | <i>Fathah+Alif</i> | Ditulis | <i>Ā</i> |
| | جَاهِلِيَّةٌ | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>Fathah+ Ya' mati</i> | Ditulis | <i>Ā</i> |
| | تَنْسَى | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3 | <i>Kasrah+ Ya' Mati</i> | Ditulis | <i>Ī</i> |
| | كَرِيمٌ | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4 | <i>Ḍammah+ Wawu mati</i> | Ditulis | <i>Ū</i> |
| | فُرُوضٌ | Ditulis | <i>Furūḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>Fathah+ya' mati</i> | Ditulis | <i>Ai</i> |
| | بَيْنَكُمْ | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | <i>Fathah+ Wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i> |
| | قَوْلٌ | Ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

| | | | |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ | Ditulis | <i>A'antum</i> |
| 2 | لَيْنِ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in Syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

| | | |
|-------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

| | | |
|------------|---------|-----------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-Samā</i> |
| الشَّمْسُ | Ditulis | <i>as-Syams</i> |

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | <i>Żawî al-furūd</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. Yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayat, dan kekuatan kepada kita semua sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam. Beribu syukur selalu penyusun ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "HUKUM JUAL BELI ASI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK". Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akedemik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahannya dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa kuliah.
8. Kepada guru-guru saya yang telah mengajarkan saya mengaji, menulis, membaca, dan sebagainya terkhusus Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo dan Al-Munawir Komplek L.
9. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai skripsi ini.
10. Kepada adik-adikku (Zannuba Arifah Munawaroh dan Ibnu 'Athoillah Masykur), keluarga besar bapak dan ibu, dan seseorang yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya.
11. Kepada semua teman jurusan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi teman selama di Jogja.
12. Kepada teman-teman Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo dan Al-Munawir Komplek L yang selalu memberikan dukungan, doa, serta tempat cerita bagi saya.

13. Kepada teman-teman UKM Olahraga Tenis Meja UIN Sunan Kalijaga yang memberikan pengalaman dan wawasan baru.
14. Kepada teman-teman KKN angkatan 102 kelompok 146 beserta pengasuh Pondok Pesantren Al-Hadi dan masyarakat yang mampu memberikan pengalaman dan semangat hidup tentang arti kehidupan.
15. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuanya dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَجَزَا كُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1442 H

22 November 2020



Muhammad Sahal Mahfudz

NIM: 17103060048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | ii |
| PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | v |
| MOTTO | vi |
| HAL PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 10 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 20 |
| 1. Jenis penelitian..... | 20 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 21 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 23 |
| BAB V PENUTUP..... | 105 |
| A. Kesimpulan..... | 105 |
| B. SARAN..... | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 107 |
| LAMPIRAN I..... | 113 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, oleh karena itu ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan manusia yang mengharuskan interaksi dengan orang lain dan disertai dengan aturan hukum yaitu bermuamalah. Muamalah disini meliputi kegiatan jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat dan beberapa usaha lainnya.¹ Dengan begitu, adanya aturan hukum atau aturan bermuamalah dapat menjadi poros bagaimana muamalah tersebut dapat menjadi sah atau bahkan sebaliknya.

Dalam hal ini, hukum dan aturan untuk bermuamalah tidak hanya dibahas oleh peraturan negara, namun juga oleh agama. Perlu diketahui, bahwa agama juga mendiskusikan dan menetapkan berbagai aturan tentang tata cara dalam melakukan transaksi yang di perbolehkan menurut agama. Pembahasan dan penetapan hukum tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan kejelasan pada pelaku muamalah yaitu manusia, tentang bagaimana mereka dapat melakukan muamalah dengan benar dan dapat dianggap sah. Dengan kata

¹ M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 6.

lain, hukum yang ditetapkan oleh agama dalam bermuamalah dapat menjadi penegas atas keraguan yang dimiliki oleh para pelaku muamalah itu sendiri.

Salah satu kegiatan manusia yang dikategorikan sebagai kegiatan bermuamalah yaitu kegiatan jual beli. Dengan kata lain, kegiatan jual beli juga diatur oleh hukum yang berlaku pada peraturan negara juga agama. Hukum jual beli menurut agama tersebutlah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu meliputi peraturan transaksi kebendaan, dimulai dari cara memperoleh benda tersebut hingga pada proses pendistribusianya.² Sehingga hukum atau peraturan yang dibuat akan disesuaikan dengan baik dan dianggap sahnyanya proses kegiatan jual beli tersebut.

Jual beli yang dimaksud merupakan kegiatan tukar menukar suatu harta dengan harta lain berdasar pada cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.³ Sedangkan, harta disini berarti segala sesuatu yang digrandungi manusia yang dapat dihadirkan ketika dibutuhkan atau juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat disimpan, dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan.⁴ Dalam proses jual beli, kehadiran harta adalah salah satu hal yang harus dihadirkan, sehingga harta dianggap sebagai objek dalam proses jual beli tersebut. Dengan kata lain, objek dalam jual beli merupakan rukun dalam mumalah, khususnya jual beli sehingga transaksi tersebut dapat dianggap sah.

² *Ibid.*

³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 12.

⁴ M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah.....*, hlm. 18.

Oleh karena itu, jika objek dalam jual beli tidak jelas atau bahkan tidak ada, maka akan berpengaruh besar pada status sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut.

Jika menyinggung rukun dan syarat yang harus hadir dalam transaksi jual beli, beberapa rukun lainnya adalah; hadirnya orang yang berakad, adanya *sighat*, adanya barang yang dibeli, serta ada nilai tukar untuk pengganti barang tersebut. Sedangkan, terdapat beberapa syarat yang telah disepakati oleh jumhur ulama, diantaranya adalah berakal dan balig. Selain itu, barang yang diperjualbelikan juga harus bersifat jelas, jelas dalam kepemilikan ataupun jelas status diperbolehkan atau tidaknya untuk diperjualbelikan. Adanya syariat untuk mengatur nilai tukar antar barang juga dapat mejadi penentu tentang bagaimana jual beli tersebut dapat dianggap pas atau seimbang.⁵

Dalam hal ini, terdapat beberapa bentuk jual beli yang masih dalam perdebatan para ulama, yaitu transaksi jual beli Air Susu Ibu (ASI). Jika dilihat dari kepemilikan dan sifat pada objek jual beli, dapat disimpulkan bahwa objek tersebut bersifat jelas dan tidak mengandung najis. Namun, hal tersebut masih belum bisa menjadi alasan kuat untuk menghukumi bahwa jual beli ASI dianggap boleh atau sah. Dengan begitu, transaksi jual beli ASI ini masih menjadi topik perdebatan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 17.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan asupan yang mengandung nilai tinggi dan menjadi asupan terbaik bagi bayi. Jika dibandingkan dengan asupan bayi lainnya, seperti beberapa jenis makanan yang dibuat oleh manusia ataupun susu hewan, ASI masih dianggap lebih baik dan lebih dibutuhkan oleh bayi.⁶ Perlu diketahui bahwa manfaat ASI bagi pertumbuhan bayi juga sudah sering dibahas oleh pakar kesehatan. Beberapa diantaranya menunjukkan bahwa anak yang pada masa bayinya mengkonsumsi ASI dapat dipastikan akan memiliki kemampuan lebih baik, seperti lebih cerdas, lebih sehat dan memiliki metabolisme yang lebih kuat.⁷ Pentingnya ASI bagi pertumbuhan bayi juga dapat dilihat dari adanya pasal negara yaitu PP. NO. 33 Tahun 2012, yang membahas tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dimana pada pasal 6 nya dijelaskan bahwasanya seorang ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.⁸

Faktanya, sebagian ibu juga sering kali tidak dapat menyusui bayinya dikarenakan karier atau hal lainnya. Hal ini berakibat pada berkurangnya atau bahkan tidak ada sama sekali asupan ASI yang didapat oleh bayi tersebut. Sehingga, tidak sedikit dari para ibu memberi asupan lain yang diharapkan dapat menggantikan peran utama ASI. Dalam pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa ibu yang tidak dapat memberi asupan ASI pada bayinya

⁶ Suhardjo, *Pemberian Makanan Pada Bayi* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 68.

⁷ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm. 30.

⁸ Pasal 6.

dengan berbagai macam sebab. *Pertama*, ibu yang memiliki pekerjaan di luar rumah sebagai pengaktualisasian diri dalam menekuni bidang tertentu. *Kedua*, faktor kesehatan yang terganggu, misalnya jika seorang ibu mengidap suatu penyakit sehingga ia tidak dapat memberi ASI pada bayinya.

Jika dilihat dari sumber lain, hal ini juga dibahas dalam al-Qu'ran:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ...⁹

Dalam hal ini, para ulama berselisih pendapat terkait penafsiran ayat tersebut. Menurut mazhab Maliki, ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang ibu wajib menyusui anaknya. Sedangkan menurut jumhur, perintah menyusui bagi seorang ibu bukanlah dihukumi wajib, melainkan sunnah (dianjurkan). Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan seorang ibu untuk menyusui anaknya terlebih dahulu sebab air susu ibu sendiri lebih baik dibanding dengan air susu orang lain.¹⁰

Ayat diatas menunjukkan bahwa seorang ibu boleh menyusukan bayinya pada wanita lain yang dianggap mampu. Selain itu, memberi upah kepada wanita tersebut juga diperbolehkan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

⁹ Al-Baqarah (2): 233.

¹⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2007), hlm. 422.

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتَهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ

أُخْرَى¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami dibebankan memberi upah kepada seorang wanita yang menyusukan bayinya. Hal ini dimaksudkan jika seorang ibu mengalami suatu kendala sehingga tidak mampu atau tidak dapat menyusui bayinya. Sehingga, solusinya adalah menyerahkan atau memasrahkan pemberian asupan ASI bayinya pada wanita lain yang mampu untuk menyusunya, kemudian memberikan upah yang sesuai dengan nilai harga sebuah objek dalam transaksi jual beli.¹²

Tradisi menyusukan bayi pada orang lain bukanlah suatu hal yang asing, dikarenakan Rasulullah SAW sebagai panutan seluruh umat muslim di dunia juga disusui oleh seorang wanita Arab Badui yang bernama Halimah al-Sa'diyah.¹³ Namun, dalam tradisi Islam tersebut lebih tepatnya adalah menyusukan seorang bayi kepada wanita tertentu yang telah diketahui identitasnya. Sehingga tidak menjadi permasalahan atau bahkan terjadi *rada'ah*. Berbeda halnya dengan zaman sekarang, dimana seorang bayi tidak lagi menyusu secara langsung pada wanita yang memberinya ASI. Melainkan wanita pemberi ASI tersebut memerah susunya dan memasukannya kedalam botol atau tempat lain untuk diperjualbelikan kepada orang yang membutuhkan.

¹¹ At-Talaq (65): 6.

¹² Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafii'i*, hlm. 423.

¹³ Muhammad Afiq Zahra, "15Sirah Nabawiyah", <https://islam.nu.or.id/para-perempuan-mulia-yang-menyusui-Nabi-Muhammad/>, akses tanggal 20 April 2020.

Jual beli ASI umumnya hanya dilakukan oleh orang perorangan. Dengan berkembangnya zaman, penjual jasa ini juga dapat mempromosikannya melalui media sosial. Seperti yang telah ditelusuri oleh peneliti mengenai transaksi jual beli ASI, bahwa para penjual dan pembeli akan sama-sama menyebutkan identitas atau saling mengetahui melalui media sosial. Dengan adanya komunikasi, tawar menawar hingga bersepakat antar kedua belah pihak, maka terjadilah proses transaksi jual beli ASI tersebut.

Seperti contoh contoh di Batam, jual beli ASI ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Rio (nama samaran), dalam sistem ini ia memberlakukan kontrak selama 1-3 bulan, jadi selama itu pembeli akan mendapat pasokan ASI. Nilai kontraknya cukup mahal, yaitu Rp 3 juta per bulan dibayar di muka. Biasaya pembeli ASI berasal dari kalangan yang secara finansial sudah mapan. Sedangankan penjual biasanya berasal dari kalangan tidak mampu. Rio tidak menggunakan data yang cukup detail dan jelas untuk diarsipkan, namun Rio menjamin ASI yang dijualnya tidak tercampur dengan ASI lain ataupun dengan zat lain. Sebab, ASI yang diambil dari ibu penjual langsung diantarkan ke rumah pembeli.¹⁴

Yang menjadi persoalan terkait adanya jual beli ASI yang terjadi sekarang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda atau terdapat kemudahan:

1. Terjadinya hubungan hukum antara ibu yang menyusui dengan anak yang di susuinya.

¹⁴ Nova, "Jual Beli ASI Lewat Internet," <http://tabloidnova.com/>, akses tanggal 24 April 2020.

2. Hubungan tersebut mengakibatkan:

- a. Pengharaman pernikahan antara anak kandung ibu susu dengan anak yang di susuinya.
- b. Penghalalan khalwat antara anak kandung ibu susu dengan anak yang di susuinya.

Adanya jual beli ASI ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam, karena kedudukan ASI disamakan dengan daging manusia dan juga ASI dianggap bukan harta benda yaitu tidak dibolehkan mengambil manfaat dari ASI, hanya dibolehkan dalam keadaan darurat bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan ASI dengan cara lain. Jadi apa yang tidak diperbolehkan mengambil manfaatnya tidaklah dianggap bagian harta seperti halnya babi dan narkoba. Selain itu, ASI tidak dijual di pasar karena tidak dianggap bagian dari harta benda.

Dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat terakait jual beli ASI. Pertama Pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa air susu manusia tidak boleh diperjualbelikan karena ASI bagian dari tubuh manusia dan bukan harta yang bisa diperjualbelikan. Kedua Pendapat Imam Malik menyatakan diperbolehkan menjual ASI dikarenakan ASI itu sifatnya suci, halal dikonsumsi, bisa dimanfaatkan dan boleh diperjualbelikan karena sifatnya menyerupai susu hewan.¹⁵

¹⁵ Abdul Mannan, *Fikih Lintas Mazhab* (Kediri: PP. Al-Falah), hlm. 67.

Dikalangan umat Islam khususnya Indonesia persoalan keabsahan hukum jual beli ASI atau donor ASI menjadi isu penting di masyarakat, karena para fuqaha berbeda pendapat terkait hukum jual beli ASI tersebut. Berangkat dari uraian di atas, penyusun tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“HUKUM JUAL BELI ASI ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK”**. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada masyarakat muslim lebih khususnya indonesia, terkait jual beli ASI tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dalam penjelasan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berbeda pendapat terkait dengan hukum jual beli ASI?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui bagaimana hukum jual beli ASI menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik terkait jual beli ASI.

Aadapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Skripsi ini diharapkan mampu menambah pengetahuan atau pengembangan ilmu Islam, khususnya terkait hukum jual beli ASI.
2. Skripsi ini diharapkan dapat menjelaskan tentang hukum jual beli ASI menurut hukum Islam, khususnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi, kajian pustaka dianggap sebagai salah satu bagian yang sangat penting untuk menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun. Selain itu, bagian ini juga difungsikan untuk membandingkan suatu penelitian dengan penelitian lainnya. Sehingga, orisinalitas dari penelitian ini bisa dipastikan bahwa penyusun akan dapat melanjutkan proses penelitian selanjutnya. Dalam penelusuran beberapa studi terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa belum ada studi terkait yang membahas topik hukum jual beli ASI secara detail. Maka dari itu, penyusun ingin mengembangkan pembahasan topik ini dengan lebih detail dan mudah untuk dipahami.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, jurnal dan buku. Ada beberapa yang memiliki kesamaan tema dengan topik penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini, penyusun ingin mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, karya tulis tahun 2017 oleh Rizky Dwi Putri Abdillah yang berjudul “Analisis Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Ditinjau Dari Hukum Islam” skripsi ini berisi tentang jual beli ASI ditinjau dari Hukum Islam adalah Mubah, namun yang menjadi persoalan ialah konsenkuensi hukumnya yaitu munculnya hubungan mahram antara anak dari ibu pendonor dan anak dari ibu penerima pendonor. Jadi jual beli ASI atau donor ASI harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada untuk menjaga dari ketidakjelasan status mahram yang dapat menjadikan jual beli ASI atau donor ASI itu menjadi hukum haram.¹⁶

Kedua, karya tulis tahun 2019 oleh Eka Rahmawati yang berjudul “Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi Tentang Air Susu Ibu (ASI) Sebagai Objek Jual Beli” skripsi ini membahas tentang jual beli ASI, menurut Mazhab Syafi’i meghukumi boleh karena termasuk benda suci, dapat dikonsumsi serta bisa dimanfaatkan. Sedangkan mazhab Hanafi melarang jual beli ini karena air susu yang telah terpisah oleh payudara wanita, telah berubah menjadi bangkai, bukan termasuk kedalam kategori harta dan termasuk bagian tubuh manusia yang terhormat dan tidak boleh diperjualbelikan. Mengenai metode *Istinbath* kedua Mazhab ini berbeda. Mazhab Syafi’i menggunakan metode *Qiyas* beliau meng*qiyaskan* ASI seperti air susu hewan sedangkan

¹⁶ Rizky Dwi Putri Abdillah, “Analisis Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Skripsi* Universitas Hasanudin Makasar Fakultas Hukum.

Mazhab Hanafi *Ijma'* bahwa menurut *Ijma'* sahabat ASI termasuk benda najis yang tidak boleh diperjualbelikan.¹⁷

Ketiga, karya tulis tahun 2018 oleh Puspita Damayanti yang berjudul “Analisis Komparasi Pemikiran Yusuf Qardawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Bank ASI” skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum mendirikan bank ASI, menurut Yusuf Qardawi membolehkan mendirikan bank ASI karena tujuan yang baik dan mulia sebab bank ASI tersebut sangat menolong manusia yang membutuhkan ASI. Bank ASI tersebut tidak menimbulkan percampuran nasab oleh sebab itu dibolehkan dan halal bagi mereka yang meminumnya, sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili hendaknya menghindari bank ASI, karena ASI yang didapatnya tidak diketahui dengan pasti siapa pemilik ASI tersebut. Bank ASI merupakan suatu perantara menuju suatu percampuran atau keraguan dalam nasab, oleh sebab itu dianjurkan untuk menghindari agar tidak terjadi bahaya yang cukup besar. Metode *istinbath* yang digunakan ulama kontemporer Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili untuk menghakim bank ASI tersebut adalah al-Qur'an dan hadis. Mereka menggunakan dasar hukum yang sama yakni al-Qur'an dan hadis, akan tetapi mempunyai pendapat yang berbeda dalam menghukuminya.¹⁸

¹⁷ Eka Rahmawati, “Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Tentang Air Susu Ibu (ASI) Sebagai Objek Jual Beli,” *Skripsi* Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah.

¹⁸ Puspita Damayanti, “Analisis Komparasi Pemikiran Yusup Qardawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Bank ASI,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah.

Keempat, karya tulis ilmiah tahun 2017 oleh Khusnul Fikriyah yang berjudul “Pendapat Mazhab Hanafi Dan Syafi’i Tentang Jual Beli ASI Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*” karya ini membahas perbedaan pendapat tentang praktek jual beli ASI, mazhab Hanafi menyatakan ketidakbolehannya dengan alasan air susu yang telah terpisah dari payudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai, bukan termasuk kedalam kategori harta dan termasuk bagian tubuh manusia yang terhormat yang tidak boleh diperjualbelikan, sedangkan mazhab Syafi’i menyatakan dengan alasan bahwasanya ASI tidak haram dikonsumsi dan merupakan benda yang suci serta dapat diambil manfaatnya, sehingga hukumnya menyerupai dengan susu hewan. Adapun jika dianalisis dengan menggunakan *maslahah al-mursalah* ada perbedaan pendapat terkait praktek jual beli ASI, *maslahah* yang terkandung dalam mazhab Hanafi yaitu dapat menolak bahaya, dari bahaya fisik sampai rusaknya hubungan darah antara manusia yang disebabkan kemahraman dan menghindarkan perkawinan yang rusak karena hubungan sesusuan, sedangkan kemasalahatan yang terkandung dalam mazhab Syafi’i yaitu dapat membawa manfaat bagi manusia berupa tercukupinya gizi bagi bayi, karena banyak bayi yang tidak dapat memperoleh ASI yang cukup, baik karena kesibukan sang ibu maupun penyakit yang dideritanya oleh ibunya tersebut.¹⁹

Kelima, karya tulis tahun 2014 Oleh Desrikanti BK yang berjudul “Konsep *Al-Radha’ah* Dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan

¹⁹ Khusnul Fikriyah, “Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang Jual Beli ASI Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*,” *Jurnal Maliyah*, Vol. 07, No. 01, Juni 2017.

Ulama Empat Mazhab” kesimpulan dari penelitian ini adalah, menunjukkan bahwa bayi yang mengambil susu dari bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut, karena susuan yang mengharamkan adalah jika ia menyusui secara langsung dengan cara menghisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sebagaimana seorang bayi menyusui terhadap ibunya. Sedangkan dalam bank ASI, bayi hanya mengambil susu yang sudah dikemas.²⁰

Setelah dilakukan pemelusuran tidak ditemukan hasil penelitian yang sama dan serupa dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, artinya masalah ini belum pernah sama sekali diteliti sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai kerangka teoritik, dan sebagai pisau analisis untuk membedah data pada penelitian ini, maka penyusun menggunakan kajian teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Melihat dari keragaman dalil dan pendapat, maka penyusun akan menggunakan teori *ta'arudh al-adillah* dan *mashlahah mursalah* untuk menganalisis masalah ini:

Pertama: *Ta'arudh al- adillah*, suatu istilah yang dijumpai dalam ilmu Ushul Fiqh, disaat seseorang berusaha mendapatkan dasar-dasar bagi sesuatu kasus, harus lebih dahulu mencari dasar hukumnya, yang menurut istilah aslinya disebut *dalilulhukmi*, jamaknya *adillatul ahkam* dan biasa disebut dalil atau adillah saja.

²⁰ Desrikanti BK, “Konsep Al-Raudha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab,” *Skripsi* Mahasiawi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari’ah Dan Hukum .

Istilah lain yang digunakan ialah *ushulul ahkam* atau *mashadirut tasyri'iyah lil ahkam*.²¹

Ta'aradh berasal dari kata *Aradla* mempunyai arti banyak, antara lain: *dhahara, ashaba, naha nahwahu*.

Kata *ta'arudh*, secara etimologi berarti pertentangan, sedangkan *al-adillah* adalah bentuk jamak dari kata *dalil*, yang berarti alasan, argumen, dan dalil.

Adapun secara terminologi, para ulama memiliki berbagai pendapat tentang definisi *ta'arud al-adillah*, di antaranya:

- a. Menurut Imam Asy-Syaukani, *ta'arudh al-adillah* adalah suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan dalil itu.
- b. Menurut Kamal Ibnu Al-Humam dan At-Taftazani, *ta'arudh al-adillah* adalah pertentangan antara dua dalil yang tidak mungkin untuk dikompromikan antara keduanya.²²

Dari pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa *ta'arudh* itu mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya dua dalil;
2. Sama martabat keduanya;

²¹ Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh jilid I*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 163

²² Rachmat Syafei, *Ilmu ushul fiqih*, cek ke-IV, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010), hlm.225.

3. Mengandung ketentuan yang berbeda;
4. Berkenaan dengan masalah yang sama;
5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu;²³

Masih ada yang perlu ditegaskan dalam pengertian *ta'arudh* ini dengan memasukkan permasalahannya dan ketentuan waktunya, kiranya pengertian berikut ini akan bisa menampungnya. *Ta'arudh* ialah:²⁴

اقتضاء كل واحد من الدليلين في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيه
الدليل الاخر فيها

Menurut Dr. Wahbah Zuhaili tidak ada dalil nas yang saling bertentangan, hanya saja pertentangan dalil syara' itu hanya menurut pandangan mujtahid bukan pada hakikatnya.²⁵ Dalam kerangka pikir inilah maka *ta'arudh* mungkin terjadi pada dalil-dalil yang *qothí* dan *dhanni*. Adapun untuk menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan *ta'arudh al-adillah*, antara lain:

1. Dengan mengkompromikan dua dalil itu selama ada peluang untuk itu, karena menggunakan dua dalil itu lebih baik dari pada mengfungsikan satu dalil saja.
2. Jika tidak dapat dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah dengan cara tarjih.

²³ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh Jilid 1*....., hlm. 167-168

²⁴ *Ibid*, 167.

²⁵ Mardani, *Ushul Fiqih I*, cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 391.

3. Selanjutnya, jika tidak ada peluang mentarjih salah satu dari keduanya, maka langkah selanjutnya adalah dengan meneliti mana diantara dua dalil itu yang lebih dahulu datangnya. Jika telah diketahui, maka dalil yang pertama dianggap telah dinasakh (dibatalkan) oleh dalil yang kedua.
4. Jika tidak mungkin mengetahui mana yang terdahulu, maka jalan keluarnya dengan tidak memakai kedua dalil itu (*tasaquth al-dalilain*). Dan dalam keadaan demikian, seorang mujtahid hendaklah merujuk kepada dalil yang lebih rendah derajatnya.

Wahbah Az-Zuhaily menyatakan faktor yang menyatakan adanya perbedaan tentang hukum Islam. Beliau mengemukakan pandangannya sebagai berikut:²⁶

Pertama, *ikhtilaf ma'anil al-fazh al-arabiyah* yang tercakup dalam kata bahasa arab seperti: kata *'am, khash, haqiqah, majaz, 'urf, muthlaq, muqayyad, musytarak, dan lafadz-lafadz al-amr.*

Kedua, *ikhtilaf ar-riwayat*, mencakup:

- a. Ada riwayat hadis yang sampai pada satu ulama.
- b. Tapi tidak sampai kepada pemikir yang lain.
- c. Riwayat hadis yang sampai ke satu ulama dengan jalan yang lemah yang tidak dapat dijadikan hujjah.

²⁶ H.Wawan Gunawan M.Ag dkk. Study Perbandingan Madzhab, cet ke-1 (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN sunan kalijaga 2006)

- d. Riwayat hadits shahih.
- e. Riwayat hadis yang rawinya lemah.
- f. Kelemahan seorang rowi tidak menjadi masalah karena prinsip *ta'dil* dan *tarjih* yang relatif subyektif.
- g. Riwayat hadits yang jalurnya disepakati tetapi untuk mengamalkannya ada beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi.
- h. Sementara ada ulama lain yang tidak memberikan syarat tertentu.

Ketiga, *ikhtilafal-mashadir*, yaitu perbedaan dalam hal penggunaan beberapa metode temuan hukum seperti pemakaian *istihsan*, *mashalih mursalah*, *qawal shahabi*, *sad ad-daaraa'i* dan lain sebagainya.

Keempat, *ikhtilaf al-qawa'id al-ushuliyah*, seperti lafadz '*am* yang di takhsish tidak dapat dijadikan dalil, lafadz mafhum tidak dijadikan hujjah, tambahan terhadap nash Al-Quran itu apakah dinasakh atau tidak dan lain sebagainya.

Kelima, *al-ijtihad bil-qiyas*, inilah penyebab yang paling luas cakupan perbedaannya diantara para ulama'.

Keenam, *at-ta'arudl wat-tarjih baynal adilah*.

Kedua: *Mashlaha mursalah* secara istilah adalah dari dua kata *mashlaha* dan *mursalah*. *Mashlaha* menurut bahasa adalah manfaat, sedangkan *mursalah* secara bahasa adalah lepas. Namun ketika digabungkan, *mashlahah mursalah* memiliki arti sesuatu yang dianggap maslahat, akan tetapi tidak terdapat ketegasan

hukum untuk merealisasikanya dan tidak ada dalil tertentu yang mendukung ataupun menolaknya.²⁷

Untuk menetapkan sesuatu yang belum tahu apakah terdapat masalahat ataupun tidak, perlu pendidikan yang mendalam atas kemanfaatan dari kemundaratan. Oleh karena para ulaman sangat berhati-hati ketika menggunakan metode hujjah, agar tidak terjadi pembentukan hukum syariat yang hanya berdasarkan hawa nafsu seorang saja.

Cara untuk menghindari hal seperti itu, dibuatlah syarat untuk menetapkan *mashlahah mursalah* sebagai metode hukum Islam, antara lain:

1. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syarak yang berlaku, yaitu secara *ushul* dan *furu'*nya tidak ada pertentangan dengan nas.
2. Kemaslahatan ini hanya bisa diterapkan dalam bidang sosial saja, dalam hal ini bidang tersebut menerima rasionalitas karena tidak diatur secara rinci dalam nas.²⁸
3. Masalahat berupa hakiki, bukan masalahat yang berupa dugaan. Yaitu agar dapat diketahui terkait pembentukan hukum itu agar tidak terjadi kemundaratan.

²⁷ H. Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 148-1499.

²⁸ Al-Syatibi, *Al-I'tisan* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115-129.

4. Maslahat umum, bukan berupa maslahat khusus. Yaitu agar pembentukan suatu hukum dapat diketahui kemanfaatan semua orang bukan hanya sekelompok orang saja.²⁹
5. Hasil maslahat ini merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah*. Metode *mashlahah* ini sebagai langkah untuk mempermudah suatu masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat, terutama masalah sosial masyarakat.³⁰

Adapun Imam Al-Ghazali memberikan syarat terkait menggunakan metode *mashlahah mursalah*, antara lain:

1. *Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syarak.
2. *Mashlahah* tidak bertentangan dengan nas.
3. *Mashlahah* termasuk dalam kategori masalah *dharuri*, baik menyangkut masalah pribadi ataupun masalah umum. Dengan kata lain, masalah ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Dalam pemaparan metode diatas, akan dijadikan penyusun sebagai dasar kerangka pemikiran untuk menganalisis kasus Hukum Jual Beli ASI tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 127.

³⁰ As-Syatibi, *Al-I'tishan*....hlm. 115-1129.

menelaah buku utama yang berkaitan dengan masalah, serta buku penunjang yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.³¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penyusun menjelaskan secara terperinci mengenai pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang hukum jual beli ASI. Kemudian menganalisis, mengkaji, dan menelaah pendapat tersebut. Setelah dianalisis, dilakukan simpulan dari pandangan kedua Imam tersebut untuk mengetahui hukumnya.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh, yaitu menganalisis data dengan meneliti kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum fikih. Untuk mendapatkan penelitian yang diinginkan, peneliti harus berdekatan dengan sumber ilmu dengan cara mencari informasi dengan cara bantuan yang telah ada di perpustakaan, seperti kitab, buku, dokumen, dan lain-lain.³²

2. Teknis Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka pengumpulan datanya dilakukan secara literer, yakni dengan meneliti

³¹ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 109.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-III (Jakarta: UI-Pres, 1986), hlm. 10.

buku-buku dan sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Primer

Sumber utam yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, kitab *Mabsuth* dalam mazhab Hanafi dan kitab *Al-Muwatta'* dalam mazhab Maliki, serta karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer tersebut.³³ Bahan sekunder antara lain berupa buku, jurnal ataupun *literature* lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai *literature*, kemudian mengkaji dan menelaah berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan syarat-syarat jual beli dan rukun-rukun jual beli dalam islam dan fenomena jual beli ASI yang bersumber dari

³³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-II (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.

beberapa referensi yang telah terkumpul. Peneliti juga menggunakan analisis *interpretatif*, yaitu sebuah upaya menganalisis konsep-konsep umum baik berupa ayat al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat-pendapat ulama mengenai *illat* jual beli dan hikmah jual beli. Dengan demikian, hikmah dan *illat* pengharaman dalam jual beli dapat diketahui sehingga jika dikontekstualisasikan dengan kasus jual beli ASI akan diketahui apakah jual beli ASI yang dilakukan tersebut diperbolehkan ataupun tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membuat sistematika penulisan skripsi ini, dengan tujuan mempermudah dalam membahas permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I, yaitu membahas tentang pendahuluan yang didalamnya menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, yaitu membahas tentang konsep penyelesaian *ta'arudh al-adillah* dan *mashlahah mursalah* sebagai pisau analisis hukum jual beli ASI.

Bab III, yaitu membahas tentang hukum jual beli ASI menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang didalamnya membahas biografi, karya, metode *istinbath*, kadar ASI, serta pandangan hukum jual beli menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Bab IV, yaitu membahas tentang analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang hukum jual beli ASI, dan metode *istinbathnya*. Dengan

menggunakan ushul fikih dan kaidah fikih untuk menemukan hukum jual beli ASI tersebut.

Bab V, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan permasalahan yang telah dijelaskan dan saran yang didasari dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun jelaskan dan paparkan mengenai hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) analisis Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang jual beli ASI

Dalam permasalahan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum jual beli ASI tidak diperbolehkan karena ASI disamakan dengan daging manusia, dan ASI merupakan barang yang tidak berharga dan seperti bangkai. Sedangkan Imam Malik berpendapat, bahwa hukum jual beli ASI diperbolehkan. Karena ASI termasuk benda suci, halal diminum, serta dapat dimanfaatkan, sehingga hukum jual beli ASI seperti halnya dengan susu kambing dan sapi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Imam Abu Hanifah lebih melihat jual beli ASI pada kesusian benda dan kemudaratan yang terjadi apabila jual beli ini dilakukan. Sedangkan Imam Malik melihatnya dari sisi kemaslahatan barang yang diperjualbelikan.

2. Metode *Istinbath* yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

Dalam menggunakan dalil, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengalami perbedaan. Imam Abu Hanifah menggunakan dalil dengan meng*qiyaskan* ASI seperti halnya bangkai, sementara Imam Malik

meng*qiyaskan* kebolehan jual beli ASI dengan kemaslahatan benda yaitu susu kambing ataupun sapi.

B. SARAN

1. Dengan banyaknya jual beli ASI yang beredar di kota-kota besar dan dunia maya, mengingatkan kepada semua orang tua bahwasanya jangan tergiur untuk membeli ASI dengan cara ilegal atau tidak tau asal usul ASI tersebut. Karena bisa berdampak pada nasab dan kesehatan bayinya.
2. Jika orangtua sangat terdesak tidak bisa mendapatkan ASI dan mencegah terjadinya percampuran nasab, maka orang tua tersebut mencari ibu susu untuk menyusui bayinya dengan memberikan imbalan atau upah kepadanya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Fiqh/Usul Fiqh

Afandi, M. Yasid, *Fiqih Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Aldizzar, Addy, dkk., *Pengetahuan Islam Kontemporer* Jakarta: PT. Pustaka Dinamika, 2014.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Ushûl*, alih bahasa 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Al-hafidz, Ahsin W., *Fikih Kesehatan* Jakarta: Amzah, 2007.

Aliy As'ad, dkk., *Terjemah Fathul Mu'in* Yogyakarta Menara Kudus, 1979.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Mazhab Al-Arba'ah* Beirut: Dar al-Qalam.

Al-Sa'di, Syekh Abdurrahman, *Fiqih Jual Beli; Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* cet. ke-I Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

al-Syawkani, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl*, alih bahasa Abu Hafs Sami bin al-'Arabi al-Asyra cet. ke-II Riyadh: Dâr al-Fadhîlah, 1421 H/2000 M.

An-Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000.

- Malik, Anas bin, *al-Muwatta'*, Juz 2 (Darul Arabi Islami, 1997).
- Ash-Shiddiqie, Muhammad Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asy-Syarbani, Muhammad bin Ahmad al-Khotib, *Mughni Ila Muhtaj Ila*
Ma'rifati al-Fadhil Minhas Libanon: Dar al-Ma'rifat, 1997.
- Asy-Syarqawi, Abdu Rahman, *Riwayat 9 Fiqih*, cet. ke-I Bandung: Pustaka
Hidayah, 2000.
- Asy-Syatubi, Imam, *Al-I'tisham*, alih bahasa Shalahuddin Sabki, dkk Jakarta:
Pustaka Azzam, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Wa Addilatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-
Kattani cet. ke-I, jild I Jakarta: Gema Insani, 2010.
- _____, *Ushul Fiqh Al-Islami* Beirut: Dar Al-Fikr, 1986 II: 799-800.
- Dahlan, Abdu Aziz, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* cet. ke-I Jakarta: Ichtiar
Baru Van Hoeve, 1996.
- Halim Hasan, Syekh H. Abdul, *Tafsir Al-Ahkam* Jakarta: Kencana, 2006.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- _____, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Ekdudukan Harta, Hak*
Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah,
Mudayanah, Koperasi dan lain-lain Jakarta: Rajawali, 2005.
- Hasan, M. Ali, *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz V.
_____, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

- Hidayat, Enang, *Ushul Fiqh* Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Huda, Qomarul, *Fikih Muamalah* cet. ke-1 Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Jazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* Jakarta: Kencana, 2006.
- Mannan, Abdul, *Fikih Lintas Mazhab* Kediri: PP. Al-Falah.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2013.
- _____, *Fiqih Ekonomi Syariah Muamalah* cet. ke-I Jakarta: Kencana, 2012.
- _____, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* cet. ke-I Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2007.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* cet. ke-III Jakarta: Amzah, 2017.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suhrawardi k, dkk., *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Supriadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru* Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syafe'i, Rachamat, *Fikih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- TIM Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* Kediri: Lirboyo Pers, 2013.

Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Yasin, Muhammad Nu'aim, *Fikih Kedokteran* cet. ke-1 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., cet. ke-XI Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

3. Skripsi/Jurnal

BK, Desrikanti, "Konsep Al-Raudha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab," *Skripsi* Mahasiawi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah Dan Hukum.

Damayanti, Puspita, "Analisis Komparasi Pemikiran Yusup Qardawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Bank ASI," *Skripsi* Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah.

Putra Irawan, Ryco, "Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Putri Abdillah, Rizky Dwi, "Analisis Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Ditinjau Dari Hukum Islam," *Skripsi* Universitas Hasanudin Makasar Fakultas Hukum.

Rahmawati, Eka, “Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi Tentang Air Susu Ibu (ASI) Sebagai Objek Jual Beli,” *Skripsi* Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah.

Fikriyah, Khusnul, “Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang Jual Beli ASI Perspektif Masalah Al-Mursalah,” *Jurnal Maliyah*, Vol. 07, No. 01, Juni 2017.

4. Lain-lain

Abdullah, Abdul Hakim, *Keutamaan Air Susu Ibu* Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.

Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahnadi, cet. ke-IV Semarang: Amzah, 2004.

Asy-Syurbasy, Ahmad, *Empat Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab* Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.

Bastoni, Hendri Andi, *101 Kisah Tabi’in* Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006.

Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* cet. ke-IX Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.

Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali* Jakarta: Bulan Bintang, tp.

Fata Islama, *Jual Beli Shahih Dan Batil*,

<https://www.google.com/amp/s/sevensweet.wordpress.com/2011/12/01/jual-beli-shahih-dan-bathil/amp/>, akses 10 Oktober 2020.

Fikri, Ali, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

- Fitriyani, “Manfaat Menyusui,” <https://id.theasianparent.com/14-manfaat-menyusui>, akses 14 Oktober 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* cet. ke-III Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nova, “Jual Beli ASI Lewat Internet”, <http://tabloidnova.com/> ,akses tanggal 24April 2020.
- Philips Dillah, Suratman, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-II Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sati, Pakih, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab* Yogyakarta: Kana Media, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-III Jakarta: UI-Pres, 1986.
- Subagyo, P.Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suci Kartini, *Rukun dan Syarat Jual Beli*, https://www.academia.edu/30551073/RUKUN_DAN_SYARAT_JUAL_BELI, akses 6 Oktober 2020.
- Suhardjo, *Pemberian Makanan Pada Bayi* Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- W. Ferial, Eddy Man, *Biologi Reproduksi* Jakarta: Erlangga, 2013.
- Wardhani, Kusuma, *ASI Bikin Anak Cerdas* Jakarta: Djambatan, 2010.
- Zahara, Muhammad Afiq, “15Sirah Nabawiyah”, <https://islam.nu.or.id/para-perempuan-mulia-yang-menyusui-Nabi-Muhammad/> ,akses tanggal 20 April 2020.

LAMPIRAN I

TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING

| Hal | Nomor Footnote | Ayat al-Qur'an dan Hadis | Terjemahan Ayat/Hadis |
|-----|----------------|--------------------------|---|
| 5 | 9 | Al-Baqarah (2): 233 | Dan ibu-ibu hendak menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna..... |
| 5 | 11 | At-Talaq (65) 6 | ...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalanya kepada mereka; dan musyawarhkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu kesulitan. Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. |
| 14 | 21 | An-Nisa' (4): 29 | Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu. |
| 25 | 10 | Al-Baqarah (2): 282 | ...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.... |
| 25 | 12 | An-Nisa' (4): 29 | ...Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.... |
| 70 | 30 | Al-Maidah (5): 3 | Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.... |
| 87 | 60 | Al-Baqarah (2): 275 | ...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... |

| | | | |
|----|----|---|--|
| 23 | 4 | Kitab Fathul Mu'in, Juz II | Jual beli menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan menurut syarak ialah menawarkan harta dengan harta pada wajah tertentu |
| 23 | 5 | Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i, Juz V | Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu. |
| 23 | 6 | Al-Mugni, Juz II | Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. |
| 23 | 7 | Fiqih Muamalah | Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. |
| 24 | 85 | Hadis Tirmizi | Telah mengabarkan kepadaku dari Qutaibatah dari Abu Awanah dari Hisam bin Urwah dari bapaknya Fatimah bin al-Mundzir dari Ummi Salamah telah berkata: Rasulullah Saw. Telah bersabda: Tidak ada hubungan persusuan kecuali dalam masa dua tahun. |
| 25 | 86 | Muwatta' | Telah menyampaikan kepadaku (hadis) dari Malik, dari Thawr ibn Sayd ad-Dili, bahwa Abdullah bin Abbas berkata: "Susu yang diisap oleh anak di bawah usia dua tahun, sekalipun Cuma satu isap, membuat keluarga angkat haram (dalam pernikahan). |
| 26 | 53 | HR. Muslim | Apa yang ditentukan dalam al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan sebagai ketentuan yang diharamkan, kemudian <i>dinasakh</i> dengan lima kali susuan. Maka Rasulullah kemudian wafat dan ketentuan itu telah <i>dinasakh</i> . |
| 27 | 54 | Sahih Bukhari | Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami: Muhammad |

| | | | |
|----|----|--------------------|---|
| | | | bin Bisyr menceritakan kepada kami: Said bin Abu 'Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Khalil, dari Abdullah bin al-Harits, bahwa Ummu al-Fadl bahwa menceritakan Nabi Muhammad Saw.bersabda: "Satu atau dua kali susuan tidak mengakibatkan hubungan mahram. |
| 28 | 53 | Ushul Fiqh | Menghubungkan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan <i>'illat</i> antara keduanya. |
| 29 | 54 | Ushul Fiqh | Menghubungkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Karena adanya kesamaan <i>'illat</i> pada hukumnya. |
| 30 | 55 | Ushul Fiqh | Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an, atau sunah, atau ijmak dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam salah satu sumber hukum Islam tersebut, karena terdapat persamaan <i>'illat</i> hukum diantara keduanya. |
| 31 | 58 | An-Nisa' (4): 59 | ...Kemudian jika kamu berlainan pendapat dengan sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada al-Qur'an dan sunahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian..... |
| 32 | 59 | Al-Hujurat (49): 1 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahulukan Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada |

| | | |
|--|--|--|
| | | Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. |
|--|--|--|

LAMPIRAN II

KITAB AL-MUGNI AL-MUHTAJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٩ — كتاب: البيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب البيع^(١)

أفرد المصنف رحمه الله تعالى لفظ البيع ولم يعبر كثيره بالبيع تأسيماً بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾^(٢). ويُطلق على أمرين: أحدهما قسم الشراء، وهو الذي يشتق منه لمن صدر عنه لفظ البيع. وحده: ثقل ملك بيمين على وجه مخصوص، والشراء قَبُولُ ذلك على أن لفظ كل منهما يقع على الآخر. تقول العرب: بعث بمعنى شَرَيْتُ وبالعكس؛ قال تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾^(٣) أي باعوه، وقال تعالى: ﴿وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾^(٤)؛ ويقال لكل من المتبايعين بَانِعٌ وَبَيْعٌ ومشتري وشار. الثاني: العقد المركب من الإيجاب والقبول، وهو المراد بالترجمة؛ وهو لغةً: مقابلة شيء بشيء، قال الشاعر:

مَا بَعَثْتُكُمْ مُهَجَّبِي إِلَّا يَوْضَلِكُمْ وَلَا أَسْلَمُهَا إِلَّا يَسْدَأُ يَسِيدَ

قال بعض المتأخرين: كذا قالوه، وينبغي أن يُزاد فيه معاوضة أو على وجه المعاوضة ليخرج رد السلام ونحوه فإنه لا يسمى بيعاً أه. وشرعاً: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. فإن قيل: يرد على هذا التعريف القرض كما لو قال خذ هذا بعثله، وكذلك الإجارة فإن الحدَّ صادقٌ عليهما وليسا ببيع، ولهذا لا ينعقدان بلفظ البيع. فإن أجيب عن الإجارة بأن المال لا يُطلق على المنفعة رُدُّ بلزوم كون الحد غير جامع الجواز جعل الثمن منفعة. وقد صرح في كتاب الوصية بدخول المنفعة في المال، فقال: الأموال تنقسم إلى أعيان ومنافع؛ وأيضاً المقابلة المطلقة ليس فيها دلالة على المقصود فإنه لم يتعرض لكونها في عقد ولا أن ذلك العقد يقتضي انتقال الملك، ولهذا زاد في المجموع: «تمليكاً». أجيب عن القرض بأنه لا يشترط فيه مقابلة المال بالمال حالة العقد لأن صيغة المقابلة مفاعلة فلا بد منها في الجانبين، والقرض لا يشترط فيه ذلك بل يكفي الدفع وتسمية أحد العوضين خاصة حتى لو قال: «أقرضتك هذا» ولم يقل «على أن تردَّ بده» صحَّ وإن لم يذكر مقابله، بخلاف البيع فإنه لا بد فيه من التصريح بذكر العوضين لتحقق المفاعلة. وعن الإجارة بأن المنافع ليست أموالاً على الحقيقة بل على ضرب من التوسُّع والمجاز بدليل أنها معدومة لا قدرة عليها؛ ولهذا اختلف العلماء في صحة

(١) روضة الطالبين: ٣٣٦/٣، حاشية الجمل: ٢/٣، التنبيه: ص ٥٤، حاشية الشرفاوي: ٢/٢، حاشية الباجوري: ٥٧٤/١، غاية البيان: ص ١٨١، المجموع: ١٤٥/٩، فتح الوعاب: ١٥٧/١، الإقناع: ٢٥٠/١، حاشية بجيري: ٢/٣، السراج الوهاج: ص ١٧٢، الأم: ٤/٣، كفاية الأخيار: ١٤٧/١، حاشية الشرواني: ٢١٤/٤، حاشية العبادي: ٢١٤/٤، إمانه الطالبين: ٢/٣، المهذب: ٢٥٧/١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٢٠.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٠٢.

كَيْفَتُكَ وَمَلِكُتُكَ، وَالْقَبُولُ كَأَشْتَرَيْتُ وَمَتَلَكْتُ وَقَبِلْتُ؛

(كَيْفَتُكَ) بكذا (وملكتُك) بكذا، وهذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعك لك بكذا كما بحثه الإسني وغيره قياساً على الطلاق، وهكذا لك بكذا كما نصّ عليه في الأم.

تنبيه: عبارة المحرز: «كَيْفَتُكَ أَوْ مَلِكُتُكَ»، وهي أوّل لأنها تدلّ على الإكتفاء بأحدهما، بخلاف عبارة المصنف. (والقبول) من المشتري، وهو ما يدل على التملك دلالة ظاهرة، (كأشتريت وتملكت وقبلت) ورضيت كما ذكره القاضي حسين عن والد الروياني، و «نعم» في الجواب كما سيأتي و «توليت» ونحوها، و «بعت» على ما نقله في شرح المهذب عن أهل اللغة والفقهاء؛ فلا يصح البيع بدون إيجاب وقبول، حتى إنهما يشترطان في عقد تولّي الأب طرفه كالبيع لماله من طفله وعكسه فلا يكفي أحدهما، إذ معنى التحصيل غير معنى الإزالة، وكالطفل المجنون وكذا السفه إن بلغ سفهياً، وإلا فوليُّ الحاكم فلا يتولّى الطرفين لأن شفقتة ليست كشفقة الأب، فلو وكلّ الحاكم الأب في هذه الصورة لم يتولّى الطرفين لأنه نائب عن الحاكم فلا يزيد عليه. وهل للأب أن يبيع مال أحد إبنيه من الآخر وهما تحت حجره؟ فيه وجهان، والظاهر منهما الصحة. وإنما احتج في البيع إلى الصيغة لأنه متوطّ بالرضا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾^(١) ولقوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ﴾^(٢) صححه ابن حبان. والرضا أمر خفي لا يطلع عليه، فأنيب الحكم بسبب ظاهر وهو الصيغة، فلا يتعقد بالمعاطة إذ الفعل لا يدلّ بوضعه، فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد، فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي، ويبدله إن تلف. وقال الغزالي: للبايع أن يتملك الثمن الذي قبضه إن سارَى قيمة ما دفعه لأنه مستحقّ ظفر بمثل حقّه والمالك راضٍ. هذا في الدنيا وأما في الآخرة فلا مطالبة لطيب النفس بها. واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع عن ابن أبي عسرون وأقرّه قال: وخلاف المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها؛ قال في الذخائر: وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن، ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما. واختار المصنّف وجماعة منهم المتولّي والبيعي الإعتقاد بها في كل ما يعدّه الناس بيعاً؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظ ف يرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة؛ وبعضهم كابن سريج والروياني خصّص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات، وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة: كرطل خبز وحزمة بقل، وقال بعضهم: كل من وسم بالبيع اكتفى منه بالمعاطاة كالعائم والتاجر، وكلّ من لم يعرف بذلك لا يصحّ منه إلا باللفظ. قال في المجموع: وأما إذا كان يأخذ من البياع ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعل كثير من الناس فإنه باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة فليعلم ذلك وليحذر منه ولا يفتخر بكثرة من يفعله. قال الأذري: وهذا ما أفتى به البيهقي؛ وذكر ابن الصلاح في فتاويه نحوه، والظاهر أنه قاله تفقهاً ومن كلامه أخذ المصنّف. لكن الغزالي في الإحياء مسامح في ذلك، فقال: وأخذ الحاجة من البياع يقع على ضربين: أحدهما أن يقول: أعطني بكذا لحماً أو خبزاً مثلاً وهذا هو الغالب، فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به، ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدّي ما اجتمع عليه، فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه. والثاني: أن يلتزم مطلوبه من غير تعرّض لثمن، كأعطني رطل خبز أو لحم مثلاً فهذا محتتمل. وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصنّف. وقوله: «أنه لا يعدّ معاطاة ولا بيعاً» فيه نظر بل يعدّه الناس بيعاً، والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوماً لهما عند الأخذ والعطاء وإن لم يتعرض له لفظاً أم.

(١) سورة النساء، الآية: ٢٩.

(٢) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» كتاب: البيوع، باب: البيع المنهي عنه (الحديث: ٤٩٦٧).

شُرْطُهُ الْإِجَابُ:

العقد عليها، فقد منع جماعة صحة الإجارة، وأنه لو حلف شخص لا مال له وله منافع بحث على الصحيح كما قاله الرافعي، وأنه لو أقر بمال ثم فُسرهُ بمنفعة لم يُقبل كما دل عليه كلام الرافعي أيضاً. وقولهم في الوصية: إن المنفعة تُحسب قيمتها من الثلث معناه أنها كالمال المفوت لا أنها في نفسها مال لأنها لا وجود لها، وإنما يُقدَّر وجودها لأجل تصحيح العقد عليها. وأيضاً المحدود إنما هو بيع الأعيان لا بيع المنافع؛ لأن بيع المنافع جنس برأسه، وإذا ثبت أن المنافع لا تسمى مالا حقيقة لم ترد على الحد لأن المجاز لا يدخل في الحدود.

فإن قيل: قد نصَّ الشافعي رحمه الله تعالى على أن الإجارة بيعٌ منفعةٌ كما نقله الإسماعيلي في كتاب الاضطلام. أجيب أنه محمول على ضرب من التوسع كما مرَّ لأن المنافع يُقدَّر وجودها لأجل صحة العقد، وما دخله التقدير لا يكون حقيقة كما يقدر الميت حيناً ليملك الدية وتورث عنه.

وخذَّ بعضهم بأنه عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد فدخل بيع حق الممزر ونحوه وخرجت الإجارة بقيد التأبيت فإنها ليست بيعاً؛ ولهذا لا تنعقد بلفظه كما مرَّ؛ والقرض بقيد المعاوضة فإنه لا يسمى معاوضة عُرفاً؛ وعقد النكاح والخلع والصلح عن الدم بقيد الملك، فإن الزوج لا يملك منفعة البضع وإنما يملك أن ينتفع به، والزوجة والجاني لا يملكان شيئاً، وإنما يستفيدان رفع سلطنة الزوج؛ ومستحق القصاص على أن النكاح خرج بقيد المعاوضة أيضاً فإنه لا يسمى معاوضة عُرفاً. وهذا الحدُّ أولى من الأول لما لا يخفى. والأصل في الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾^(٢). وأظهر قول الشافعي أن هذه الآية عامة في كل بيع إلا ما حُصَّ بالسنة فإنه ﷺ نهي عن بيعوع، والثاني: أنها مجملة والسنة مبينة لها. وتظهر فائدة الخلاف في الاستدلال بها في مسائل الخلاف، فعلى الأول يستدل بها وعلى الثاني لا يستدل، وأحاديث كحديث: سئل النبي ﷺ أي الكسب أطيب؟ فقال: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»^(٣)؛ أي لا عس فيه ولا خيانة. رواه الحاكم وصححه. وحديث: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»^(٤).

وأركانه كما في المجموع ثلاثة، وهي في الحقيقة ستة: عاقد وهو بائع ومشتري، ومعقود عليه وهو ثمن ومثمن، وصيغة وهي إيجاب وقبول. وكان الأولى للمصنف أن يقدم الكلام على العاقد ثم المعقود عليه ثم الصيغة، لكنه بدأ بها كما قال الشارح لأنها أهم للخلاف فيها، وأولى من ذلك أن يقال لأن العاقد والمعقود عليه لا يتحقق إلا بها؛ وعبر عنها بالشرط لخلاف تعبيره في المجموع كالغزالي بأركان البيع؛ والتعبير بالركن أولى. نعم قد يُراد بالشرط ما لا بد منه فيسوي التعبير بالركن، فقال:

(شرطه) أي البيع صيغة، وهي (الإيجاب) من البائع، وهو ما يدل على التملك بعوض دلالة ظاهرة؛

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

(٣) أخرجه الحاكم في «المستدرک» كتاب: البيوع (الحديث: ١٠٢/٢).

(٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين (الحديث: ٣٤٥٨) بلفظ: لا يفتقرن اثنان إلا عن تراض وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في خيار... (الحديث: ١٢٤٨) بلفظ: لا يفتقرن عن بيع إلا عن تراض وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: بيع الخيار (الحديث: ٢١٨٥) وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (الحديث: ٥٣٦/٢) بلفظ: لا يفتقر المتبايعان عن بيع... .

LAMPIRAN II

KITAB AL-MUWATTA'

أو تكارى منه: أعطيك ديناراً أو درهماً أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة: وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك، لك باطل بغير شيء^(١).

١٧٨٣- قال مالك: والأمر عندنا، أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح، بالأعبد من الحبسة، أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنقاد والمعرفة. لا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبد، أو بالأعبد، إلى أجل معلوم، إذا اختلفت فبان اختلافه. فإن أشبه بعض ذلك بعضاً حتى يتقارب، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وإن اختلفت أجناسهم^(٢).

١٧٨٤- قال مالك: ولا بأس بأن تبع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه، إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه^(٣).

١٧٨٥- قال مالك: لا ينبغي أن يشتري جنين في بطن أمه، إذا بيعت، لأن ذلك غرر، لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أو ناقص أو تام، أو حي أو ميت. وذلك يضر من ثمنها^(٤).

١٧٨٦- قال مالك: في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل، ثم يتقدم البائع فيسأل المبتاع أن يقبله بعشرة دنانير، يدفعها إليه

(١) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٤٧١)، وسويد بن سعيد (٢١٧).

(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٤٧٢)، وسويد بن سعيد (٢١٧).

(٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٤٧٣).

(٤) كذلك (٢٤٧٤).

نقدًا، أو إلى أجلٍ، ويمحو عنه المئة دينارٍ التي له؛ قال مالكٌ: لا بأس بذلك. وإن ندم المبتاع، فسأل البائع أن يُقبله في الجارية أو العبد، ويزيده عشرةً دنانير نقدًا أو إلى أجلٍ، أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي. وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مئة دينار له، إلى سنة قبل أن تحل بجاريةٍ وبعشرةً دنانير نقدًا، أو إلى أجلٍ أبعد من السنة. فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجلٍ^(١).

١٧٨٧- قال مالكٌ في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينارٍ إلى أجلٍ، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه: إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك، أن يبيع الرجل الجارية إلى أجلٍ، ثم يبتاعها إلى أجلٍ أبعد منه. يبيعها بثلاثين دينارًا إلى شهرٍ، ثم يبتاعها بستين دينارًا إلى سنة. أو إلى نصف سنة. فصار، إن رجعت إليه سلعتُه بعينها، وأعطاه صاحبُه ثلاثين دينارًا، إلى شهرٍ؛ بستين دينارًا إلى سنة، أو إلى نصف سنة. فهذا لا ينبغي^(٢).

(٢) ما جاء في مال المملوك

١٧٨٨- حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبداً وله مالٌ، فماله للبائع. إلا أن يشتريه المبتاع^(٣).

(١) كذلك (٢٤٧٥).

(٢) كذلك (٢٤٧٦).

(٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٤٧٧)، وسويد بن سعيد (٢١٨)، وعبد الله بن يوسف التميمي عند البخاري ٣/١٥٠ (٢٣٧٩) ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٩٣)، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٥/٣٢٤.

قلت: هكذا روى مالك هذا الأثر من قول عمر. وقد أخرج الشيخان (البخاري ١٥٠/٣، ومسلم ١٧/٥) وغيرهما عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع». وقال البخاري عقبه: «وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر في العبد». وهذا موصول بالإسناد الأول المذكور في حديث سالم، وتقديره: حدثنا عبدالله بن يوسف، عن مالك، قاله ابن حجر في الفتح ٦٥/٥ وقال: «وصله أبو داود من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النخل مرفوعاً، وعن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد موقوفاً، وكذا هو في الموطأ ولفظه: عن ابن عمر، عن عمر بقصة العبد، وعن نافع عن ابن عمر عن النبي بقصة النخل... وأخرجه النسائي من طريق يحيى القطان عن عبيدالله العمري عن نافع عن ابن عمر، عن عمر بقصة العبد (موقوفاً) ومن رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بالقصتين، قال النسائي: إنه خطأ، والصواب ما رواه يحيى القطان، وكذلك رواه الليث وأيوب عن نافع في العبد موقوفاً».

قلت: ومن أجل ذلك تتبع الإمام الدارقطني على الشيخين إخراج الشطر الثاني من حديث سالم عن أبيه المرفوع، فقال: «أخرجا جميعاً حديث الزهري عن سالم عن أبيه، عن النبي ﷺ: من باع عبداً وله مال. وقد خالفه نافع عن عبدالله بن عمر، عن عمر. وقال النسائي: سالم أجل في القلب، والقول قول نافع» (التتبع ٤٣٥-٤٣٦). وقد ساق الترمذي حديث سالم المرفوع بشقيه: من ابتاع نخلاً، ومن ابتاع عبداً (١٢٤٤) ثم قال: «وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح... وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «من ابتاع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع». وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: من باع عبداً وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، هكذا رواه عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي ﷺ نحو سالم... قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ أصبح ما جاء في هذا الباب (الجامع ٥٢٥-٥٢٦ بتحقيقنا). وتعقب النووي الدارقطني فقال: «ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Sahal Mahfudz
 Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 02 November 1996
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Email : sahalmahfudz718@gmail.com
 Nomor Handphone : 08998327123
 Alamat Asal : Jl. Masjid Astana Jenu, Kec. Jenu, Kab. Tuban
 Alamat di Yogyakarta : Jl. Ori 2 No. 2A, Papringan, Depok, Sleman



Latar Belakang Pendidikan

2001-2003 : TK Muslimat NU dan TK RA Al-Hidayah
 2003-2009 : SDN Latsari 30 Tuban
 2009-2012 : SMPN 3 Tuban
 2012-2015 : SMA An-Nur Bululawang Malang
 2015-2017 : STIIK An-Nur Bululawang Malang

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Muhammad Sahal Mahfudz